

Implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Sekardangan Village, Sidoarjo District

Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo

Bella Tri Inda Ningrum¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the Implementation of the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) in Sekardangan Village, Sidoarjo District. The method used is a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, field observations, and documentation in the form of archives, reports, and related administrative data. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of SIKS-NG in Sekardangan Village has been running, but is not yet fully optimal. In the communication indicator, the delivery of information related to system changes and to the community is not optimal. In the indicator of resources, facilities and infrastructure are adequate, but there is still a dependence on one main operator. In the indicator of disposition, operators show commitment in carrying out their duties, even though there has been no formal selection and special incentives. In the indicator of bureaucratic structure, there is no special SOP available at the village level and the division of authority is carried out in stages. The novelty of this study lies in the analysis of the implementation of SIKS-NG at the village level using the Edwards III theoretical framework comprehensively and providing an overview of the implementation of e-government at the local level.*

Keywords - Implementation; SIKS-NG; Poverty; E-Government; Bureaucracy

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi berupa arsip, laporan, serta data administratif terkait. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi terkait perubahan sistem dan kepada masyarakat belum optimal. Pada indikator sumber daya, sarana dan prasarana telah memadai, namun masih terdapat ketergantungan pada satu operator utama. Pada indikator disposisi, operator menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas, meskipun belum terdapat seleksi formal dan insentif khusus. Pada indikator struktur birokrasi, belum tersedia SOP khusus di tingkat kelurahan dan pembagian kewenangan dilakukan secara berjenjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi SIKS-NG di tingkat kelurahan menggunakan kerangka teori Edwards III secara komprehensif serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan e-government pada tingkat lokal.*

Kata Kunci - Implementasi; SIKS-NG; Kemiskinan; E-Government; Birokrasi

I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari setiap pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketersediaan data yang akurat mengenai kondisi kemiskinan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan [1]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada bulan maret tahun 2024 tercatat sebesar 9,03% dengan jumlah 25,22 juta jiwa [2]. Sedangkan angka kemiskinan di sidoarjo pada maret tahun 2024 sebesar 4,53% dengan 109,39 ribu jiwa [3]. Karena itu, kemiskinan perlu ditangani sebagai isu prioritas melalui pendekatan yang integratif dan menyeluruh [4]. Salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Disebutkan beberapa asas-asas pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip good governance, seperti keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi [5]. Selain itu, pembagian tugas dan kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam mengatur pelaksanaan otonomi daerah, pembagian urusan pemerintah, serta hubungan keuangan, kewenangan administratif, dan tanggung jawab masing-masing Tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat [6], [7].

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, keberhasilan program bantuan sosial masih sering terkendala oleh persoalan teknis dalam pendataan. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, tumpang tindih data, serta belum terintegrasinya sistem pendataan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kebijakan sosial yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi perlu diarahkan pada perbaikan sistem informasi berbasis digital yang akurat dan terstandarisasi. Dalam kerangka good governance, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk dalam hal pengelolaan data sosial. Oleh karena itu, implementasi e-government menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pelayanan sosial, khususnya melalui pengembangan sistem informasi kesejahteraan yang terintegrasi. E-Government sendiri merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah guna menciptakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh Masyarakat [8], [9].

Pengelolaan data kesejahteraan sosial di Indonesia didasarkan pada amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, yang telah mencabut Perpres sebelumnya (No. 110 Tahun 2021). Peraturan Presiden ini mengatur bahwa Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, kementerian memiliki sejumlah fungsi utama, salah satu di antaranya adalah menentukan kriteria dan pendataan terhadap fakir miskin. Tugas tersebut secara teknis telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang secara komprehensif mengatur proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial secara lebih akurat dan terarah. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Selain sebagai alat pendataan, sistem ini juga berperan penting dalam pendistribusian bantuan sosial kepada Masyarakat. Permensos ini juga mengatur tentang kewajiban operator aplikasi SIKS-NG di Tingkat daerah untuk melakukan verifikasi dan penutakhiran data secara berkala, serta ketentuan teknis lainnya yang mendukung akurasi dan akuntabilitas data bantuan sosial [10], [11].

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah aplikasi yang digunakan untuk memasukkan atau memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan. Sistem ini dirancang sebagai alat yang efisien dan terintegrasi dalam pengelolaan informasi kemiskinan, dengan fokus pada akurasi dan ketepatan data. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sarana yang efektif bagi pihak terkait dalam mengumpulkan dan memperbarui data kemiskinan secara tepat sasaran hingga tingkat lokal, sehingga mendukung perencanaan dan pelaksanaan program bantuan yang menjangkau individu maupun keluarga yang benar-benar membutuhkan. Aplikasi ini, dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, juga berfungsi untuk memproses pengusulan data baru serta melakukan perbaikan pada data terpadu Masyarakat miskin di Tingkat desa [12]. Salah satu desa atau kelurahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tampilan dari SIKS-NG.



Gambar 1. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

Sumber: Operator SIKS-NG Kelurahan Sekardangan (2025)

Kelurahan Sekardangan telah menggunakan SIKS-NG dari tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Sebagai sebuah sistem berbasis digital, SIKS-NG digunakan untuk melakukan pendataan, perbaikan dan pembaruan data masyarakat miskin yang ada di wilayah tersebut. Sistem ini menghubungkan berbagai sumber data sehingga memudahkan pemerintah kelurahan maupun instansi terkait untuk mengidentifikasi secara jelas siapa saja yang memerlukan bantuan serta kondisi yang

dialami. Dengan adanya informasi yang detail dan dapat diperbarui, SIKS-NG tidak hanya mempercepat proses pengelolaan bantuan, tetapi juga menjamin agar program sosial yang dijalankan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Beberapa bantuan sosial yang terdapat di SIKS-NG Kelurahan Sekardangan meliputi PBI (Penerima Bantuan Iuran), SEMBAKO, PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), RUTILAHU (Rumah Tidak layak Huni), dan YAPI (Yatim Piatu).

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Sekardangan

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah (KK)
PBI	325
SEMBAKO	73
PKH	50
YAPI	5

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, yang tercatat berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan data tersebut, terdapat 325 KK penerima PBI, 73 KK penerima SEMBAKO, 50 KK penerima PKH, dan 5 KK penerima YAPI. Data tersebut menggambarkan bahwa SIKS-NG digunakan dalam penerimaan bantuan sosial di tingkat kelurahan. Besarnya jumlah data yang dikelola tersebut menunjukkan pentingnya proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data secara tepat agar informasi mengenai keluarga penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala berkaitan dengan perubahan mekanisme pengelolaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan tersebut sempat memengaruhi proses pengusulan dan pembaruan data masyarakat melalui SIKS-NG, sehingga operator perlu menyesuaikan diri dengan mekanisme pengelolaan data yang baru. Selain kendala pada perubahan mekanisme pengelolaan data, penggunaan SIKS-NG juga masih menghadapi kendala teknis, seperti kesulitan melakukan login, password yang tidak valid, serta adanya pembaruan pada sistem yang mengharuskan operator melakukan penyesuaian dalam penggunaannya. Meskipun kendala teknis tersebut relatif jarang terjadi dan dapat ditangani oleh operator, kondisi tersebut tetap menjadi bagian dari tantangan dalam pelaksanaan SIKS-NG di tingkat kelurahan. Di samping itu, proses operasional SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan masih bergantung pada satu operator utama yang bertanggung jawab dalam penginputan, verifikasi, dan pembaruan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan masih memerlukan penyesuaian dalam menghadapi perubahan mekanisme pengelolaan data serta dukungan dalam mengatasi kendala teknis selama penggunaan sistem.

Implementasi kebijakan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh aturan formal yang ditetapkan pembuat kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh tindakan para birokrat level bawah atau *street-level bureaucrats*. Mereka adalah aparatur publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memiliki diskresi luas dalam melaksanakan tugas. Keputusan yang mereka ambil, rutinitas yang mereka bentuk, dan strategi yang mereka gunakan untuk menghadapi tekanan kerja maupun keterbatasan sumber daya pada akhirnya membentuk kebijakan publik itu sendiri. Dengan demikian, implementasi kebijakan bersifat nyata di lapangan dan sangat ditentukan oleh praktik serta interpretasi para birokrat pelaksana [13].

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang berada di antara perumusan kebijakan dengan dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi dipahami sebagai upaya untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan ke dalam program yang bersifat operasional dan berkesinambungan. Dengan kata lain, implementasi berfungsi menjembatani keputusan formal pembuat kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan memberikan pengaruh langsung bagi Masyarakat. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, komunikasi merupakan proses penyampaian keputusan dan perintah kebijakan kepada pelaksana agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya yang memadai. Disposisi merupakan sikap, kemauan, dan kecenderungan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya membutuhkan pemahaman dan kemauan dari para pelaksana, tetapi juga kemauan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Struktur birokrasi merupakan faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki pemahaman, kemauan, dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat apabila struktur organisasi tidak mendukung [14].

Beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Nafilah Dzakiyah Al azizah & Isna Fitria Agustina dengan judul “Implementasi Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarbendo” dengan metode penelitian kualitatif dan teori dari George C. Edward

III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi positif dalam upaya pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat pelaksana, serta struktur birokrasi. Informasi terkait program sudah berusaha disampaikan secara transparan, tetapi belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat. Keterbatasan dana dan jumlah tenaga pelaksana menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Di sisi lain, meskipun komitmen pemerintah desa cukup tinggi, lambannya proses administrasi mengurangi efektivitas implementasi. Struktur birokrasi yang berlaku dinilai mendukung, namun penyederhanaan prosedur masih dibutuhkan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efisien dan akuntabel [15].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dinaningrum & Eva Hany Fanida dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan dan Verifikasi Bantuan Sosial di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori dari Indrajit (2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi dalam pengusulan dan verifikasi bantuan belum berjalan optimal. Beberapa hambatan yang muncul antara lain keterbatasan akses di tingkat kecamatan serta kurangnya kegiatan sosialisasi, yang berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan. Di sisi lain, Pemerintah Desa Kledokan sudah menunjukkan dukungan melalui alokasi anggaran musyawarah, pemberian honor bagi operator, serta penyediaan sarana pendukung. Namun, penunjukan operator tanpa memperhatikan faktor usia dan latar belakang pendidikan menyebabkan kinerja belum optimal. Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa SIKS-NG memberikan manfaat nyata, seperti mempercepat proses perbaikan data, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta membantu pemerintah daerah dalam mengelola data kemiskinan sehingga penyaluran program lebih tepat sasaran [16].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Diaz Handa Pratama & Isnaini Rodiyah dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori dari George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Dari aspek komunikasi, pemerintah desa hanya melakukan sosialisasi sekali sehingga ketika ada pembaruan sistem tidak disertai dengan sosialisasi ulang. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana sudah terpenuhi, tetapi kemampuan SDM dalam mengoperasikan aplikasi masih terbatas serta tidak ada alokasi anggaran khusus untuk implementasi. Pada aspek disposisi, proses penunjukan pegawai dilakukan secara selektif sesuai peraturan yang berlaku, dan pemerintah desa juga memberikan dukungan berupa kesempatan mengikuti diklat serta rencana beasiswa pengembangan kompetensi bagi operator, sehingga operator memahami tugas dan fungsinya. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, implementasi SIKS-NG belum memiliki SOP tertulis, tetapi karena minim fragmentasi, konsistensi data tetap sejalan dengan data pusat [12].

Berdasarkan observasi di lapangan, pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah perubahan kebijakan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sempat menghambat proses pengusulan dan pembaruan data masyarakat selama masa transisi. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tingkat kelurahan, terutama bagi operator yang harus menyesuaikan diri dengan sistem dan aturan baru. Selain itu, belum adanya bimbingan teknis atau pelatihan rutin dari instansi terkait membuat operator harus belajar secara mandiri setiap kali terjadi pembaruan fitur atau mekanisme kerja sistem. Keterbatasan dukungan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan teknis ini menyebabkan pengelolaan data berjalan kurang optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SIKS-NG di tingkat kelurahan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang tepat apabila tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran langsung mengenai suatu fenomena [17]. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan, dan data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan sumber lain yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian [18]. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyu Eko Prasetyo selaku Lurah Kelurahan sekardangan, Ibu Sri Agustina selaku Sekretaris di Kelurahan Sekardangan, dan Ibu Ayu Putri Anisya selaku operator SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan. Adapun Teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pengumpulan Data, yaitu proses pengumpulan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian; reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan; penyajian data, yaitu mengorganisasi informasi agar lebih mudah dipahami; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu merumuskan makna data sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian [19].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Edwards III menjelaskan bahwa kebijakan hanya dapat dijalankan secara efektif apabila para pelaksana memahami dengan jelas apa yang seharusnya mereka lakukan. Untuk itu, keputusan maupun intruksi kebijakan perlu disampaikan kepada pihak yang tepat dengan pesan yang jelas, akurat, dan konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup kejelasan isi pesan, keseragaman instruksi, serta pemahaman yang sama di antara aktor-aktor implementasi. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, maka kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Namun sebaliknya, apabila komunikasi lemah atau terjadi distorsi informasi, pelaksana berpotensi salah menafsirkan isi kebijakan, yang pada akhirnya dapat menghambat bahkan menggagalkan proses implementasi. Dengan demikian, komunikasi berfungsi sebagai penghubung utama antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaan nyata di lapangan [14].

Menurut Edward III, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan proses penyaluran atau penyampaian informasi kebijakan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Penyaluran komunikasi diperlukan agar informasi dapat diterima oleh pelaksana secara tepat. Hambatan dalam proses transmisi dapat menyebabkan informasi mengalami perubahan, keterlambatan, atau bahkan tidak sampai kepada pihak yang seharusnya menerima informasi. Kejelasan berkaitan dengan sejauh mana informasi atau perintah kebijakan yang diterima oleh pelaksana dapat dipahami dengan baik. Informasi yang diberikan harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan maupun penafsiran yang berbeda. Kejelasan diperlukan agar pelaksana dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Konsistensi berkaitan dengan kesesuaian dan kestabilan informasi atau perintah yang diberikan kepada pelaksana. Perintah yang berubah-ubah atau tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, informasi dan perintah yang diberikan kepada pelaksana perlu disampaikan secara konsisten agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan [14].

Dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan, komunikasi menjadi aspek penting karena operator membutuhkan informasi yang tepat mengenai penggunaan sistem, mekanisme pengelolaan data, serta perubahan yang berkaitan dengan sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG, informan menyebutkan:

“kalau soal system ini memang kadang tidak ada informasi langsung yang jelas. seperti waktu perubahan DTKS ke DTSEN itu juga sama, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba saat mau buka aplikasi tidak bisa diakses, ternyata ada perubahan itu tadi. Jadi memang informasinya tidak turun secara jelas.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses transmisi informasi mengenai perubahan sistem belum berjalan secara optimal. Operator tidak memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya perubahan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Informasi mengenai perubahan tersebut justru diketahui ketika operator mengalami kendala dalam mengakses sistem. Dengan demikian, informasi mengenai perubahan kebijakan atau mekanisme sistem belum sepenuhnya disampaikan kepada pelaksana secara tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala pada aspek transmisi komunikasi karena informasi yang seharusnya menjadi dasar bagi operator dalam menjalankan tugas belum diterima sebelum perubahan diterapkan.

“Terkait informasi kami tidak memberitahukan secara langsung seperti diumumkan, diberitakan, dishare seperti itu, cuma kalau ada warga datang ke kelurahan kemudian tanya mau mengajukan, itu baru diinformasikan kalau memang saat ini belum bisa pengusulan, belum bisa diajukan untuk bantuan-bantuan karena ada peralihan di tahun ini dari DTKS ke DTSEN.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai mekanisme pengusulan bantuan belum disampaikan secara aktif kepada masyarakat. Informasi baru diberikan ketika terdapat warga yang datang dan menanyakan mengenai pengajuan bantuan. Meskipun kondisi tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa operator tidak memahami sistem, hal tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai perubahan mekanisme belum dikomunikasikan secara luas dan terstruktur. Dalam perspektif Edward III, kejelasan komunikasi tidak hanya berkaitan dengan adanya informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan sehingga pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi dan tindakan yang perlu dilakukan.

“kalau misalnya ada surat yang turun, kalau ngga ada surat apapun yang turun dari atas maksudnya entah dari kemensos turun ke dinas sosial kemudian turun ke kecamatan atau ke kelurahan, ya ngga ada yang diteruskan.”
(Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai SIKS-NG belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Informasi cenderung diteruskan ketika terdapat pemberitahuan atau surat resmi dari tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan pelaksana di tingkat kelurahan sangat bergantung pada informasi yang diteruskan dari tingkat atas.



Gambar 2. Media Sosial Kelurahan Sekardangan
Sumber: Akun Instagram Kelurahan Sekardangan

Keberadaan media sosial Kelurahan Sekardangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa kelurahan telah memiliki sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan menerima komunikasi dari masyarakat. Namun, keberadaan sarana komunikasi tersebut belum menunjukkan bahwa informasi mengenai SIKS-NG dan mekanisme pengusulan bantuan sosial telah disampaikan secara aktif melalui kanal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, informasi terkait pengusulan bantuan masih lebih banyak disampaikan ketika masyarakat datang langsung ke kelurahan dan menanyakan mengenai pengajuan bantuan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara ketersediaan sarana komunikasi dengan pemanfaatannya sebagai media penyampaian informasi terkait SIKS-NG. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aspek transmisi komunikasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang lebih aktif dan terstruktur, terutama ketika terdapat perubahan mekanisme atau kebijakan yang berkaitan dengan pengusulan bantuan sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan pada aspek komunikasi memiliki persamaan dengan penelitian Al azizah & Agustina (2025) di Desa Banjarebendo yang menunjukkan bahwa komunikasi program transparan, tetapi informasi belum sepenuhnya mudah diakses oleh Masyarakat [15]. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di Kelurahan Sekardangan, di mana penyampaian informasi kepada Masyarakat belum optimal. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dinaningrum & Fanida (2025) tentang penerapan SIKS-NG di Desa

Kledokan, Kecamatan Bendo, yang menunjukkan bahwa penerapannya belum optimal akibat kurangnya sosialisasi [16]. Persamaannya terletak pada belum optimalnya penyampaian informasi. Sementara itu, penelitian Pratama & Rodiyah (2025) di Desa Tinggarbuntut menunjukkan bahwa sosialisasi SIKS-NG hanya dilakukan satu kali sehingga pembaruan sistem tidak disertai sosialisasi ulang. Penelitian tersebut sejalan dengan penemuan di Kelurahan Sekardangan terkait komunikasi saat perubahan sistem. Perbedaannya, di Desa Tinggarbuntut kendalanya berupa tidak adanya sosialisasi ulang, sedangkan di Sekardangan perubahan sistem tidak disampaikan terlebih dahulu kepada operator.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi masih menjadi kendala dalam implementasi SIKS-NG. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan permasalahan yang lebih spesifik, yaitu keterlambatan informasi kepada operator, kurang jelasnya informasi mengenai perubahan mekanisme pengusulan bantuan, serta penyampaian informasi yang masih bergantung pada instruksi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Berdasarkan aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi Edward III, komunikasi dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan dapat dinilai belum optimal.

B. Sumber Daya

Menurut Edward III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan jelas tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi staf yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan, informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, kewenangan, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan [14].

Menurut Edward III, sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh kecukupan kemampuan dan kompetensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan:

“Operator aplikasi ini memang hanya saya sendiri, jadi sehari-hari yang pegang sistem ya saya. Tapi kalau misalnya saya ada halangan, entah itu cuti, sakit, atau ada urusan mendesak sehingga tidak bisa masuk kantor, sudah ada satu orang lain yang bisa membantu untuk menggantikan sementara. Jadi tidak sampai benar-benar berhenti pelayanannya, karena staf tersebut sebelumnya juga sudah sering ikut mendampingi.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan masih bergantung pada satu operator utama. Namun, ada staf pengganti yang dapat menggantikan operator utama ketika berhalangan, sehingga pelayanan tetap dapat berjalan. Dengan demikian, dari aspek sumber daya manusia relatif mendukung pelaksanaan SIKS-NG, meskipun masih terdapat ketergantungan pada operator utama.

Edward III menjelaskan bahwa fasilitas fisik atau sarana dan prasarana merupakan sumber daya penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan staf yang memadai tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan:

“Ahamdulillah kalau soal sarana prasarana di sini bisa dibilang sudah mencukupi. Di sini ada computer, laptop, jaringan internet di sini juga mendukung, jadi terkait fasilitas selama ini tidak ada kendala. Terkait eror system biasanya seperti gagal login, kemudian password tidak valid, terus ada pembaruan aplikasi, tapi kendala-kendala seperti itu biasanya disampaikan langsung aja, itukan biasanya ada grup operator kemudian nanti di tindaklanjuti. Terkait system yang eror juga sangat jarang terjadi.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia telah mendukung pengoperasian SIKS-NG. Hal ini didukung oleh ketersediaan komputer, laptop, dan printer dalam kondisi baik. Adapun data sarana dan prasarana Kelurahan Sekardangan sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	Komputer	4	Baik
2.	Laptop	4	Baik
3.	Printer	4	Baik

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 2 di atas, sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Sekardangan berada dalam kondisi baik dan dapat menunjang pelaksanaan SIKS-NG. Selain perangkat kerja, jaringan internet yang tersedia juga dinilai mendukung operasional sistem. Dengan demikian, fasilitas fisik tidak menjadi hambatan utama dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan. Adapun dari sisi jumlah pegawai, Kelurahan Sekardangan memiliki 12 pegawai yang terdiri dari berbagai jabatan struktural maupun fungsional.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai Pemerintah Kelurahan Sekardangan

Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
Lurah	L	1
Sekretaris Kepala Desa	P	1
Kepala Seksi Pemerintahan	L	1
Kepala Subbagian	L	1
Mudin	L	1
Staff	L&P	4
PPKBD	P	1
Deaver	L	1
Kebersihan	L	1
Total		12

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3 di atas, jumlah pegawai Kelurahan Sekardangan secara keseluruhan berjumlah 12 orang. Namun, tidak seluruh pegawai memiliki tugas sebagai operator SIKS-NG. Pelaksanaan sistem secara langsung masih menjadi tanggung jawab satu operator utama dengan dukungan satu staf sebagai pengganti sementara jika dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia tersedia, tetapi pengelolaan SIKS-NG masih memiliki ketergantungan pada personel tertentu.

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, sumber daya dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan dapat dikatakan relatif terpenuhi. Fasilitas dan jaringan internet mendukung pelaksanaan sistem, sedangkan staf pengganti membantu menjaga keberlangsungan pelayanan meskipun masih terdapat ketergantungan pada satu operator utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dinaningrum & Fanida (2025) di Desa Kledokan yang menunjukkan bahwa sumber daya bukan menjadi hambatan utama dalam penerapan SIKS-NG. Persamaannya terletak pada ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan sistem. Namun, di Kelurahan Sekardangan masih terdapat ketergantungan pada satu operator utama meskipun tersedia staf pengganti. Dengan demikian, sumber daya relatif mendukung implementasi SIKS-NG, terutama dari sisi fasilitas, sedangkan aspek staf masih perlu diperkuat.

C. Disposisi

Menurut Edward III (1980), disposisi merupakan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaksana, tetapi juga pada kesediaan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, disposisi dilihat dari sikap pelaksana, proses pengangkatan atau penunjukan operator, serta dukungan yang diberikan kepada pelaksana dalam menjalankan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan [14].

Menurut Edward III, pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam disposisi karena pelaksana kebijakan perlu dipilih berdasarkan dedikasi dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, operator SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan ditunjuk langsung oleh lurah berdasarkan kemampuan mengoperasikan komputer dan pengalaman dalam pekerjaan administrasi.

“Tidak ada seleksi atau tahapan khusus, jadi langsung saja ditunjuk oleh pak lurah dari staf yang ada di kelurahan ini. Jadi sistemnya sederhana, siapa yang menurut pak lurah dianggap mampu dan bisa mengoperasikan komputer, ya itulah yang dipilih. Tidak ada proses administrasi tambahan, tidak ada tes atau persyaratan khusus. Kadang pertimbangannya juga karena staf itu sebelumnya sudah terbiasa mengurus administrasi, sudah paham alur kerja, jadi lebih mudah diarahkan untuk mengelola aplikasi. Jadi untuk operator aplikasi itu ditunjuk oleh pak lurah, staf yang mampu untuk memegang, tanpa ada prosedur panjang.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, penunjukan operator dilakukan secara langsung tanpa melalui seleksi formal. Meskipun demikian, penunjukan didasarkan pada kemampuan komputer dan pengalaman administrasi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SIKS-NG. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan kemampuan dalam pengangkatan operator, meskipun proses penunjukannya belum dilakukan secara formal dan terstruktur.

Selain proses penunjukan, disposisi juga berkaitan dengan dukungan dan insentif yang diberikan kepada pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara, operator SIKS-NG tidak memperoleh insentif atau tunjangan khusus karena tugas tersebut dianggap sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari.

“Kalau untuk insentif, sebenarnya tidak ada insentif khusus yang diberikan bagi staf yang ditunjuk mengelola aplikasi ini. Jadi tidak ada tambahan honor atau tunjangan tertentu. Kami hanya menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku, sama seperti pegawai kelurahan pada umumnya. Tugas mengelola sistem ini dianggap bagian dari pekerjaan sehari-hari, jadi tidak ada perbedaan khusus antara staf yang pegang aplikasi dengan staf lainnya. Kalau pun ada tambahan, biasanya hanya berupa pengalaman dan pengetahuan baru, seperti ikut bimtek biasanya.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Meskipun tidak terdapat insentif khusus, pelaksana memperoleh pengalaman dan pengetahuan tambahan melalui kegiatan seperti bimbingan teknis. Dengan demikian, dukungan terhadap pelaksana lebih terlihat dalam bentuk pengembangan pengetahuan daripada pemberian insentif finansial.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Pratama & Rodiyah (2025) di Desa Tinggarbuntut yang menunjukkan adanya proses rekrutmen perangkat desa secara selektif serta dukungan pengembangan kompetensi bagi operator melalui diklat dan rencana beasiswa. Sementara itu, di Kelurahan Sekardangan, operator ditunjuk langsung oleh lurah tanpa seleksi formal dan tidak memperoleh insentif khusus. Dengan demikian, dukungan terhadap pelaksana dalam penelitian terdahulu lebih terstruktur dibandingkan dengan kondisi di Kelurahan Sekardangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan relatif mendukung, tetapi belum sepenuhnya optimal. Jika dikaitkan dengan indikator disposisi Edwards III, pengangkatan operator telah mempertimbangkan kemampuan komputer dan pengalaman administrasi, meskipun dilakukan tanpa seleksi formal. Sementara itu, dari aspek insentif belum terdapat tambahan honor atau tunjangan khusus bagi operator. Meskipun demikian, operator tetap menjalankan tugas dan mengikuti bimbingan teknis dalam mendukung pelaksanaan SIKS-NG.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang mengatur bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan oleh para pelaksana. Edwards III menjelaskan bahwa meskipun pelaksana telah memahami kebijakan, memiliki kemauan untuk melaksanakan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tetap dapat mengalami hambatan apabila struktur birokrasi yang ada tidak mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan pembagian tugas serta kewenangan yang telah ditetapkan.

Menurut Edwards III, terdapat dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan pedoman atau prosedur kerja yang digunakan untuk memberikan standar bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan SOP dapat membantu pelaksana memahami tahapan kerja, mengurangi kesalahan, menjaga konsistensi, dan mempercepat pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, fragmentasi berkaitan dengan penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan kepada beberapa unit atau tingkatan organisasi. Pembagian tanggung jawab tersebut membutuhkan koordinasi agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan, struktur birokrasi dapat dilihat melalui aspek SOP dan fragmentasi. Kedua aspek tersebut menunjukkan bagaimana pelaksanaan SIKS-NG diatur serta bagaimana pembagian kewenangan berlangsung dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan.

SOP merupakan pedoman yang memberikan arahan mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam implementasi SIKS-NG, SOP diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada operator mengenai tahapan dan mekanisme pengelolaan data melalui sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan, diketahui bahwa belum terdapat SOP khusus di tingkat kelurahan yang mengatur secara rinci pelaksanaan tugas operator SIKS-NG. Informan menyampaikan:

“Di sini memang tidak ada SOP khusus yang mengatur secara rinci bagaimana cara kerja operator aplikasi. Jadi tidak ada panduan tertulis di tingkat kelurahan. Kami mengikuti saja apa yang ada di dalam aplikasi itu langsung. Jadi sehari-hari saya tidak pegang SOP manual, tapi lebih banyak menyesuaikan dengan aplikasi yang sudah berjalan.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan belum didukung oleh SOP khusus pada tingkat kelurahan. Operator dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak mengacu pada petunjuk yang tersedia dalam aplikasi dan menyesuaikan dengan sistem yang sedang berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek SOP dalam struktur birokrasi belum berjalan secara optimal karena belum terdapat pedoman tertulis yang secara khusus mengatur pelaksanaan tugas operator SIKS-NG di tingkat kelurahan. Tidak adanya SOP khusus menyebabkan pelaksanaan tugas operator belum memiliki pedoman teknis tertulis yang dapat dijadikan acuan secara konsisten. Terlebih ketika terdapat perubahan dalam sistem maupun mekanisme pengelolaan data, operator perlu menyesuaikan pelaksanaan tugas berdasarkan informasi dan petunjuk yang tersedia. Oleh karena itu, penyediaan SOP khusus di tingkat kelurahan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja operator serta mendukung pelaksanaan SIKS-NG secara lebih terarah dan konsisten.

Selain SOP, struktur birokrasi menurut Edwards III juga berkaitan dengan fragmentasi. Fragmentasi menunjukkan adanya penyebaran tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan kebijakan kepada beberapa unit atau tingkatan organisasi. Dalam implementasi SIKS-NG, pelaksanaan pengelolaan data kesejahteraan sosial berlangsung melalui struktur birokrasi yang berjenjang, yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Dengan adanya tingkatan tersebut, pelaksanaan SIKS-NG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit organisasi, tetapi melibatkan beberapa tingkatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada tingkat Kelurahan Sekardangan, hasil

wawancara menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara tingkat kelurahan dan tingkat pusat. Informan menyampaikan:

“Sekarang kan sistemnya bukan DTKS lagi tapi DTSEN, jadi semua warga sudah otomatis masuk, bukan hanya yang miskin saja tapi semuanya ada dengan kelas masing-masing. Data itu langsung terhubung ke pusat, dan yang melakukan validasi itu dari Kemensos. Jadi kami di kelurahan hanya update atau melaporkan kalau ada perubahan data, sama menginformasikan ke warga kalau ada pencairan. Untuk bantuannya juga sekarang langsung masuk ke rekening penerima.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa Kelurahan Sekardangan memiliki peran dalam melakukan pembaruan atau pelaporan apabila terdapat perubahan data serta menyampaikan informasi mengenai pencairan bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, proses validasi data dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan SIKS-NG antara unit organisasi pada tingkat kelurahan dan tingkat pusat. Pembagian kewenangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Kelurahan Sekardangan

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 3, struktur organisasi Kelurahan Sekardangan terdiri atas Lurah sebagai pimpinan kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretaris Kelurahan serta beberapa kepala seksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan SIKS-NG, pengelolaan data kesejahteraan sosial berkaitan dengan fungsi pada bidang kesejahteraan sosial, termasuk pelaksanaan tugas operator yang menjalankan kegiatan teknis pengelolaan data melalui sistem. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pelaksanaan SIKS-NG menjadi bagian dari tugas organisasi kelurahan dan tidak berdiri sebagai kegiatan yang terpisah dari struktur pemerintahan Kelurahan Sekardangan.

Dibandingkan dengan penelitian Al azizah & Agustina (2025) mengenai implementasi SIKS-NG di Desa Banjarbendo yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian di Kelurahan Sekardangan menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih memiliki kelemahan pada aspek SOP karena belum tersedia pedoman khusus bagi operator SIKS-NG di tingkat kelurahan. Sementara itu, pada aspek fragmentasi telah terdapat pembagian kewenangan secara berjenjang antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan SIKS-NG.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan belum sepenuhnya optimal. Jika dikaitkan dengan indikator struktur birokrasi Edwards III, kelemahan utama terdapat pada aspek SOP, karena belum tersedia pedoman tertulis khusus yang mengatur pelaksanaan tugas operator SIKS-NG di tingkat kelurahan. Sementara itu, pada aspek fragmentasi, implementasi SIKS-NG telah menunjukkan adanya pembagian kewenangan secara berjenjang antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, struktur birokrasi masih perlu diperkuat terutama melalui penyediaan SOP yang jelas di tingkat kelurahan agar pelaksanaan SIKS-NG dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan pembagian tugas serta kewenangan yang ada.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai perubahan sistem dan informasi kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal, terutama dalam hal transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada aspek sumber daya, sarana dan prasarana telah memadai serta tersedia staf pengganti, namun masih terdapat ketergantungan pada satu operator utama. Pada aspek disposisi, operator menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas dan mengikuti bimbingan teknis, meskipun pengangkatan belum melalui seleksi formal dan belum terdapat insentif khusus. Pada aspek struktur birokrasi, belum terdapat SOP khusus di tingkat kelurahan, sementara pembagian kewenangan dilakukan secara berjenjang sehingga memerlukan koordinasi antarinstansi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan sudah berjalan dan didukung oleh sumber daya serta pelaksana yang menjalankan tugasnya, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Permasalahan yang paling menonjol terdapat pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai perubahan sistem dan belum tersedianya SOP khusus di tingkat kelurahan. Sementara itu, aspek sumber daya relatif mendukung dan disposisi pelaksana relatif baik, meskipun masih terdapat ketergantungan pada satu operator utama, proses pengangkatan yang belum melalui seleksi formal, serta belum adanya insentif khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi yang lebih aktif, jelas, dan konsisten serta penyusunan SOP khusus agar implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, "Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024." Accessed: Aug. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d2848c3990f081182125a416/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2024.html>
- [2] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen."
- [3] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Maret 2025 Kabupaten Sidoarjo," BPS.
- [4] I. F. A. Sekar Arum Puspita Ramadhani, "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa," *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi negara*, vol. 14, no. 04, pp. 28–38, 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>
- [5] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial."
- [6] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah." Accessed: Aug. 07, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- [7] Republik Indonesia, "UU Nomor 9 Tahun 2015."
- [8] G. Fitri Azizah, R. Khairul Anwar, Y. Winoto, U. Padjadjaran Jl Raya Bandung Sumedang Km, and J. Barat, "Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional Mapping Global Research on Poverty and Welfare: Toward National Policy Reform," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.46807/inspirasi.v16i1.4779.
- [9] M. Hafel, J. Jamil, and M. Umasugi, "Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics," *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 44–58, 2022.
- [10] Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 162 Tahun 2024."
- [11] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial."
- [12] I. R. Muhammad Diaz Handa Pratama, "Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal," *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 14, no. 04, pp. 39–52, 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>
- [13] Michael Lipsky, "Street Level Bureucracy Dilemmas of the Individual in Publik Services," Russel Sage Foundation.
- [14] A. M. A. A. Moh. Yunus, "Hitam Putih Kebijakan Publik di Indonesia."
- [15] Nafilah Dzakiyah Al Azizah and Isna Fitria Agustina, "Implementasi Bantuan Sosial (BANSOS) Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarebendo," *Journal Publicuho*, vol. 8, no. 1, pp. 322–331, Mar. 2025, doi: 10.35817/publicuho.v8i1.670.

- [16] E. H. F. Dinaningrum, "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan dan Verifikasi Bantuan Sosial di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, vol. 5, no. 1, pp. 70–78, 2025.
- [17] M. Sandelowski, "Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description?," *Res. Nurs. Health*, vol. 23, no. 4, pp. 334–340, 2000, doi: 10.1002/1098-240x(200008)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g.
- [18] Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Alfabeta Bandung.
- [19] M. H. J. S. Matthew Miles, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Sage, 2014. Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: https://ia803100.us.archive.org/0/items/spradleyanalisisdatakualitatifmodeletnografi/Matthew_Miles%2C_Michael_Hberman%2C_Johnny_Sdana-Qualitative_Data_Analysis__A_Methods_Sourcebook-Sage_%282014%29%5B1%5D.pdf

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.